



e-ISSN3032-601X & p-ISSN3032-7105

Vol. 1, No. 2, Tahun 2024

MISTER

**Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research**

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 1, No. 2, 2024

Pages: 196-202

Analisis Kritis Kemunculan Regulatori State Pasca Krisis di Asia Timur dalam Ekonomi Politik Liberalism Otoriter Pemerintahan

Hanny Pramuditha Pratiwi, Eli Apud Saepudin, Fara Padila, Ana Suktiana,
Satrio Tri Buwono

Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Bina Bangsa, Kota Serang, Indonesia

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v1i2.1434>

How to Cite this Article

APA : Pratiwi, H. P., Saepudin, E. A., Padila, F., Suktiana, A., & Buwono, S. T. (2024). Analisis Kritis Kemunculan Regulatori State Pasca Krisis di Asia Timur dalam Ekonomi Politik Liberalism Otoriter Pemerintahan. *MISTER: Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 1(2), 196 – 202. <https://doi.org/10.32672/mister.v1i2.1434>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



9

773032

710001

9

773032

601002

Analisis Kritis Kemunculan Regulatori State Pasca Krisis di Asia Timur dalam Ekonomi Politik Liberalism Otoriter Pemerintahan

**Hanny Pramuditha Pratiwi^{1*}, Eli Apud Saepudin², Fara Padila³, Ana Suktiana⁴,
Satrio Tri Buwono⁵**

**Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bina Bangsa, Kota
Serang, Indonesia^{1,2,3,4,5}**

Email:

hannypramudithapратиwi@gmail.com^{1*}, eli.apud.saepudin@binabangsa.ac.id²,
parapadila655@gmail.com³, anasukti.27@gmail.com⁴, satriotribuwono@gmail.com⁵

Diterima: 01-04-2024

| Disetujui: 02-04-2024

| Diterbitkan: 03-04-2024

ABSTRACT

The East Asian financial crisis of 1997-1998 triggered significant transformations in the regional political economy landscape. One of the most prominent changes was the rise of the "regulatory state" in East Asian countries, where the role of the state in regulating markets and finance expanded. The East Asian economic crisis of 1997 marked a turning point in the region's economic and political model. Amidst vigorous economic liberalization, the crisis exposed fundamental vulnerabilities and inequalities. In response, stronger state regulation in various economic sectors emerged. This paper analyzes the emergence of post-crisis state regulation in East Asia within the political economy framework of authoritarian liberalism. This perspective sees how the state, despite embracing economic liberalism, still plays a central role in regulating markets and directing development.

Keywords: *Regulatory State; Financial Crisis; Liberalism.*

ABSTRAK

Krisis keuangan Asia Timur pada tahun 1997-1998 memicu transformasi signifikan dalam lanskap ekonomi politik regional. Salah satu perubahan yang paling menonjol adalah munculnya "negara pengatur" di negara-negara Asia Timur, di mana peran negara dalam mengatur pasar dan keuangan diperluas. Krisis ekonomi Asia Timur tahun 1997 menandakan titik balik dalam model ekonomi dan politik di kawasan tersebut. Di tengah liberalisasi ekonomi yang gencar, krisis ini mengekspos kerentanan dan ketimpangan yang mendasar. Sebagai respon, muncullah regulasi negara yang lebih kuat dalam berbagai sektor ekonomi. Kajian ini menganalisis kemunculan regulasi negara pasca krisis di Asia Timur dalam kerangka ekonomi politik liberalisme otoriter. Perspektif ini melihat bagaimana negara, meskipun menganut liberalisme ekonomi, tetap memainkan peran sentral dalam mengatur pasar dan mengarahkan pembangunan.

Katakunci: Keadaan Regulasi; Krisis Keuangan; Liberalisme.

PENDAHULUAN

Pasca Perang Dingin yang ditandai dengan runtuhnya Tembok Berlin dan mencapai puncaknya dengan runtuhnya Uni Soviet, isu keamanan dunia bergeser menjadi isu regional yang kemudian memunculkan kekuatan baru dalam geopolitik dan geostrategi global. Tiongkok yang pada era Perang Dingin merupakan "mitra komunis setia" Uni Soviet, telah menjadi super power baru di kawasan Asia. Namun, kehadirannya ini jelas menjadi "ancaman" tidak hanya di kawasan tetapi juga bagi negara-negara lain di dunia termasuk Amerika Serikat (AS) yang telah menjadi kekuatan super power tunggal pasca Perang Dingin. Selain AS, Uni Eropa (UE) juga merasa terancam dengan kehadiran China sebagai salah satu kekuatan baru di dunia. Agar kedua kekuatan ini dapat mengontrol dan mengimbangi kekuatan China, maka terjalinlah kerjasama dan hubungan diplomatik antara AS, UE dan China. (Pradipta et al., 2021).

Krisis keuangan global yang bermula dari krisis kredit perumahan di Amerika Serikat membawa implikasi pada kondisi ekonomi global secara menyeluruh. Hampir di setiap negara, baik di kawasan Amerika, Eropa, maupun Asia Pasifik, merasakan dampak akibat krisis keuangan global tersebut. Krisis ini berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat pada sistem keuangan, dan sangat membahayakan sistem perbankan. Kalau sistem perbankan ambruk, ekonomi akan runtuh, rakyat akan sengsara. Mengingat, perkembangan di dunia perbankan yang sangat pesat serta tingkat kompleksitas yang tinggi dapat berpengaruh terhadap performa suatu bank. Kompleksitas usaha perbankan yang tinggi dapat meningkatkan resiko yang dihadapi oleh bank-bank yang ada di Indonesia. Permasalahan perbankan di Indonesia antara lain disebabkan oleh lemahnya kondisi internal bank, dan modal yang tidak dapat mengcover terhadap resiko-resiko yang dihadapi oleh bank tersebut menyebabkan kinerja bank menurut Ruslan Abdullah (2014). (Sitorus et al., 2022)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan metode studi literasi yang diambil dari berbagai sumber. Dengan menggambarkan fenomena yang masih berlangsung saat ini dan telah terjadi di masa lampau. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder seperti sumber buku, jurnal, dan media kepustakaan lainnya. Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif dengan menyusun, menyelidiki, dan mengintegrasikan data yang ditemukan sehingga menjadi sebuah analisa deskriptif kualitatif. (Pradipta et al., 2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejak pertama kali ilmu ekonomi diakui sebagai cabang ilmu tersendiri dengan munculnya buku yang sangat terkenal "*The Inquiry Into The Nature and Causes of The Wealth of Nation*" (1776) oleh Adam Smith, persoalan pembangunan ekonomi, belum banyak dibicarakan. Masalah ini baru aktual setelah perang dunia kedua (PD II), (Arsyad, 1999: 4). Saat itu negara-negara yang baru merdeka berusaha mengejar

ketertinggalannya, sehingga muncullah ekonomi pembangunan yang selanjutnya selalu dihubungkan dengan negara-negara baru merdeka atau negara-negara sedang berkembang (NSB) atau juga disebut negara-negara dunia ketiga (Gilarso, 1992:428) (Alderson, J. Charles & Wall, 1992).

Pembangunan nasional, khususnya bidang ketenagakerjaan diarahkan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat pekerja. Oleh karena itu hukum ketenagakerjaan harus dapat menjamin kepastian hukum, nilai keadilan, asas kemanfaatan, ketertiban, perlindungan dan penegakan hukum. Seiring dengan pembangunan bidang ketenagakerjaan, tampak maraknya para pelaku dunia usaha berbenah diri pasca krisis ekonomi dan moneter untuk bangun dari mimpi yang buruk, serta terpaan gelombang krisis ekonomi global yang melanda asia tenggara, di mana Indonesia tidak lepas dari terpaan gelombang tersebut. Pemerintah dalam upaya mengatasi krisis ekonomi global bersama dengan masyarakat, terutama para pelaku usaha, salah satu alasan pokok untuk menstabilkan perekonomian dan menjaga keseimbangan moneter serta menghindari kebangkrutan sebagian besar perusahaan yang berdampak terhadap sebagian besar nasib para pekerja pabrik dan berujung pada pemutusan hubungan kerja (Arliman S, 2017).

Proyek-proyek pembangunan dalam suatu wilayah tidak terlepas dari keputusan strategis dari para penguasa ditingkat level kepemimpinan nasional maupun daerah. Proyek-proyek pembangunan tersebut membutuhkan dana yang tidak sedikit yang diperlukan keseriusan oleh pemerintah maupun dari lembaga legelatif dalam melakukan sistem penganggaran yang teralokasi secara efektif. Efektifitas penggunaan dana-dana proyek-proyek pembangunan yang dipergunakan haruslah tepat guna dan tepat sasaran, dalam Sejarah perkembangan yang terjadi di negara-negara dunia hal demikian ini tidak pernah terjadi, dimana hal demikian dibuktikan hasil temuan Winters yang menjelaskan bahwa proyek-proyek investasi yang didanai Bank Dunia menunjukkan hubungan negatif antara penargetan dan sasaran proyek investasi pembangunan (Winters, M., 2014). (Kian, 2018)

Kebanyakan informasi tidak bisa mencapai khalayak di tingkat terbawah dari struktur masyarakat karena menggunakan jaringan formal, karena orang yang duduk di jaringan formal memiliki jaringan sosialnya sendiri dan jaringan sosial ini dianggapnya lebih penting. Misalnya informasi mengenai bantuan yang mestinya ditujukan kepada warga desa ternyata tertahan di tingkat elit desa. Pada kenyataanya jaringan formal tidak jalan, misalnya ketika sang Lurah mengetahui tentang kredit, informasi tersebut tidak dia salurkan kepada kalangan miskin di daerahnya, melainkan kepada kerabatnya (Setiawan, 1989). Dan apabila ada proyek pembangunan fisik di desa, maka yang akan mengetahui terlebih dahulu adalah elit desa. Setelah itu informasi dimanfaatkan oleh elit desa untuk kepentingan diri dan kelompoknya (Setiawan, 1989 : 3) (PetrusAnaAndung, 2010).

Namun pada perkembangannya, teori pembangunan yang berbasis pada modernisasi ini melahirkan persenyawaan dengan kekuatan-kekuatan otoritarian yang menjadikan ‘developmentalisme’ sebagai tulang punggung untuk mempertahankan legitimasi mereka. Herbert Feith menyebutnya sebagai ‘rezim developmentalis represif’. (Feith, 1981). Dengan model ini, pembangunan yang berbasis pada mekanisme pasar dan teknokrasi digalakkan dengan melalui represi atas kekuatan-kekuatan sosial yang menghalangi pembangunan. Dengan model ini, lahirlah oligarki politik yang disangga oleh pemilik modal dan lembaga keuangan internasional (Robison, 2006) (Ekonomi-politik, 2013).

Tulisan ini berangkat dari asumsi bahwa kekuatan ekonomi pasar bebas, yang umumnya masuk sebagai anggota WTO (World Trade Organization) turut berkontribusi memicu terjadinya pergerakan Reformasi termasuk di Indonesia pada beberapa tahun lalu. Bahkan setelah berlangsung lebih dari satu

dekade lebih hingga mendekati dua dekade ini, indikasi yang memenangkan gerakan Reformasi tersebut pada kepentingan domestik tidak terbukti, sebagai gantinya kekuatan ekonomi pasar yang memenangkannya. Masyarakat Indonesia menjadi sebuah negara yang sangat liberal di berbagai sektor kehidupannya dengan kecepatan yang pincang untuk mengikutinya (Suparno & Wibawa, 2014).

Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi, namun pada kenyataannya ditemukan kebijakan ekonomi dari beberapa produk hukum yang justru mengikis prinsip dalam demokrasi ekonomi yaitu kebersamaan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Prof. Dr. Adi Sulistyono dalam pidato pengukuhan Guru Besarnya menyebutkan bahwa selama ini sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi kapitalis “malu-malu” (malu untuk diakui pemerintah), sehingga banyak peraturan perundang-undangan yang lebih mengabdikan pada konglomerasi dibandingkan rakyat kecil. Perjuangan berat sebenarnya adalah merealisasi amanat konstitusi dengan menghasilkan produk hukum yang melindungi segenap rakyat bangsa Indonesia (Undang-undang & Khoifah, 2022).

Reformasi kebijakan yang didesain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi cenderung mempengaruhi kecepatan integrasi ekonomi suatu negara baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan. Reformasi kebijakan yang mempromosikan kondisi-kondisi makroekonomi yang stabil, nilai tukar yang realistis, rezim perdagangan dan investasi yang terbuka merupakan faktor-faktor yang penting untuk pertumbuhan dan integrasi. Di samping itu infrastruktur telekomunikasi dan transportasi juga berperan penting dalam mempengaruhi integrasi ekonomi (Ikhsan, 2004).

Menggunakan pendekatan konstruktivis dari Alexander Wendt, tulisan ini lebih jauh ingin menelusuri bagaimana neoliberalisme mengajak negara-negara pasca kolonial untuk merayakan pasar bebas dan demokrasi sambil melupakan imajinasi negara sebagai identitas perlawanan atas kolonialisme. Dengan membentuk prinsip, ide serta sistem keyakinan sebagai norma tatanan dunia baru, persebaran itu berlangsung secara sistematis melalui berbagai upaya penanganan krisis ekonomi, baik berupa pemberian pinjaman dan bantuan luar negeri maupun dengan mengkonstruksi sejumlah norma baru sistem pemerintahan yang paralel dengan bekerjanya mekanisme pasar (Wirasenjaya, 2012).

Dalam hal ini, apa yang dikemukakan oleh Oscar Lafontaine menjadi penting. “Krisis di Asia Timur seperti yang pernah terjadi di Meksiko sebelumnya menunjukkan bahwa pasar tidak dapat menyelesaikan segalanya. Sebaliknya, pasar yang tidak dikontrol menyebabkan perkembangan negatif, sehingga semua orang di dunia harus membayarnya dengan kehilangan yang sangat besar, termasuk kehilangan mata pencahariannya” (Nur, 2017).

Kemudian adapun krisis keuangan yang terjadi secara luas mengakibatkan gangguan di pasar keuangan sehingga menimbulkan kendala terhadap aliran kredit untuk keluarga, bisnis yang menimbulkan efek buruk terhadap sektor riil dan jasa. Istilah ini lazim digunakan untuk para investor secara tiba-tiba kehilangan sejumlah investasinya dan lembaga keuangan tiba-tiba kehilangan proporsi yang signifikan dari nilai investasi para investor. Krisis keuangan dapat terjadi dalam beberapa sekmen pasar, yaitu: *crash* pasar saham, bable ekonomi krisis mata uang dan *defaults* nilai tukar. Gelembung (*bubble*) ekonomi umumnya terjadi karena kemudahan dalam memberikan kredit rumah tangga, hutang yang berlebihan, spekulasi, keserakahan, penipuan, dan korupsi. Kemudahan dalam memberikan kredit menyebabkan hilangnya disiplin dalam nilai pasar yang memadai, pada akhirnya terjadi *intigates* pinjaman dengan kebijakan yang tidak bijaksana. (Sitorus et al., 2022)

Sementara dalam pandangan neo- Marx, liberalisasi justru membuat adanya *unequal exchange* yang lebih besar, bahkan penghisapan. Ini adalah modus Operandi yang jamak: membuka pasar seluas-luasnya bagi kepentingan korporasi multinasional, menghilangkan peran negara yang interventif untuk kepentingan pasar yang kompetitif, atau dalam bahasa Robison dkk. (2004): *hijacking the state*: membangun oligarki yang kokoh dengan elit pemerintahan agar kepentingan pasar tetap terjaga. (Umar, 2012)

Pasca Perang Dingin yang ditandai dengan runtuhnya Tembok Berlin dan mencapai puncaknya dengan keruntuhan *United States Soviet Russia* (USSR), isu-isu keamanan dunia bergeser pada isu-isu kawasan yang kemudian memunculkan kekuatan-kekuatan baru dalam geopolitik dan geostrategik global. China yang pada era Perang Dingin “mitra setia komunis” bagi USSR telah menjelma menjadi super power baru yang menjadi penguasa di kawasan Asia. Namun, kehadiran tersebut jelas menjadi “ancaman” tidak saja di kawasan tetapi juga bagi Negara-negara lain di dunia termasuk bagi Amerika Serikat (AS) yang telah menjadi super power tunggal pasca Perang Dingin. Selain bagi AS, Uni Eropa (UE) pun juga merasa terancam dengan hadirnya China sebagai salah satu kekuatan baru di dunia. Supaya kedua kekuatan ini dapat mengontrol dan mengimbangi kekuatan China, maka diadakanlah kerja sama dan juga hubungan diplomatik antara AS, UE dan China (Pradipta et al., 2021).

Fenomena globalisasi yang menguat sejak krisis finansial 1970an membawa kapitalisme global memasuki fase baru, yaitu era ‘Revolusi Finansial’. Dalam era ini hampir seluruh negara di dunia telah terkoneksi dalam sistem keuangan berbasis finansial berupa perputaran uang virtual yang terintegrasi secara global. Tercatat pertumbuhan ekonomi dunia meningkat tajam setelah adanya finansialisasi. Perputaran mata uang meningkat dari US\$ 15 milyar pada 1973 menjadi US\$ 1,2 triliun pada 1995. Hal ini meningkatkan pemerataan sirkulasi valuta dan kedekatan negara-negara dalam globalisasi. Namun di sisi lain, finansialisasi sarat akan krisis. Dikatakan demikian karena sistem finansialisasi memungkinkan kebebasan yang tidak terkendali, yang menjadikan seluruh operasi ekonomi menjadi spekulatif. Hal ini karena terjadi demokratisasi setiap lini kehidupan ke dalam sistem finansial. Sebagai contoh, setiap orang diperbolehkan bermain dalam bursa saham selama ia mampu membeli setiap lembar sahamnya. Titik rentannya adalah apabila orang tersebut merasa merugi, ia dapat sewaktu-waktu menarik dananya sementara dana tersebut merupakan penopang berjalannya pasar. Salah satu contoh tindakan spekulasi ini adalah seperti apa yang dilakukan George Soros di pasar saham Asia pada 1998 (Mentor, n.d.).

Solusi harus disesuaikan dengan masalah yang dihadapi. Karena krisis ini bukan variabel tunggal, tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu perspektif. Karena banyak aspek yang saling terkait, maka pendekatannya harus “sistematis” dalam semua konteks. Bukan berarti semuanya harus segera diselesaikan, karena hanya dibidang ekonomi ada masalah jangka pendek dan jangka panjang, ada masalah mikro dan makro yang semuanya harus diselesaikan. Dalam hal ini, pilihan dan prioritas yang realistis mungkin perlu dipertimbangkan. Namun, karena kita harus menerima kekecewaan, pendekatan ini harus berkelanjutan, konsisten, tetapi fleksibel. (Lubis & Batubara, 2023)

KESIMPULAN

1. Krisis ekonomi yang melanda Asia Timur pada akhir tahun 1990-an, termasuk Indonesia, memiliki dampak yang luas dan kompleks. Krisis ini tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga pada aspek sosial dan politik.

2. Lemahnya sistem perbankan di Indonesia menjadi salah satu penyebab krisis. Pengawasan pemerintah terhadap bank-bank yang melanggar ketentuan tidak efektif, dan banyak bank yang beroperasi meskipun tidak memiliki modal yang cukup.
3. Bank Indonesia berperan penting dalam menghadapi krisis ekonomi tersebut. Upaya pemulihan termasuk rekapitalisasi bank-bank untuk memperkuat sistem perbankan. Meskipun krisis ini berdampak besar, langkah-langkah yang diambil mencerminkan peran regulatori negara dalam menghadapi tantangan ekonomi dan politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Achsin, M. Z., & Rosalinda, H. (2021). *Teori-Teori Migrasi Internasional*. Universitas Brawijaya Press.
- Arliman S, L. (2017). Perkembangan dan Dinamika Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia. *Jurnal Selat*, 5(1), 74–87. <http://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat>
- Ekonomi-politik, T. (2013). *Politik Luar Negeri Indonesia dan Perubahan Diskursus tentang Pembangunan : Sebuah. September*.
- Ikhsan, M. (2004). *Mohamad Ikhsan*. 7.
- Kian, L. (2018). Political and Religious Contributions in Economic Development. *Integrated Journal of Business and Economics*, 2(1), 104. <https://doi.org/10.33019/ijbe.v2i1.63>
- Lubis, R. F., & Batubara, C. (2023). Strategi Manajemen Syariah Dalam Menghadapi Krisis Ekonomi. *Madani: Jurnal Ilmiah ...*, 1(6), 819–825. <https://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/view/510%0Ahttps://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/download/510/536>
- Nur, H. (2017). Peluang Dan Ancaman Masyarakat Ekonomi Asean (Mea) Bagi Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 3(2), 157. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v3i2.217>
- PetrusAnaAndung. (2010). Perspektif Komunikasi Ritual Mengenai Pemanfaatan Natoni Sebagai Media Komunikasi Tradisional Dalam Masyarakat Adat Boti Dalam Di Kabupaten Timr Tengah Selatan, Propinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(1), 1–11.
- Pradipta, A., Adikara, B., Pradipta, A., Adikara, B., & Rofii, M. S. (2021). *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional Relasi Interpersonal Amerika Serikat , China , dan Uni Eropa dalam Ekonomi dan Keamanan Relasi Interpersonal Amerika Serikat , China , dan Uni Eropa dalam Ekonomi dan Keamanan*. 4(2).
- Setiyono, B. (2019). Konsep dan Perbandingan Politik.
- Sitorus, A. P., Mahlel, Majid, M. S. A., Marliyah, & Handayani, R. (2022). Krisis Keuangan Masa Depan dan Sistem Keuangan Baru. *Jurnal EMT KITA*, 6(1), 136–146. <https://doi.org/10.35870/emt.v6i1.561>
- Suparno, B., & Wibawa, A. (2014). Hegemoni Kapitalisme Dalam Transisi Demokrasi Di Indonesia Analisis Wacana Kritis. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 12(3), 215–230.
- Umar, A. R. M. (2012). Ekonomi Politik Perminyakan Indonesia: Analisis Kebijakan Liberalisasi Sektor Hulu Migas Indonesia pasca-1998. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 16(1), 45–61. <http://jurnalsospol.fisipol.ugm.ac.id/index.php/jsp/article/view/285>
- Undang-undang, T. R., & Khoifah, A. (2022). *Pembenahan Muatan Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional Melalui Policy Screening Tool*. 148–164.

Wirasenjaya, A. M. (2012). Strukturisasi Norma: Pengarusutamaan Gagasan Neoliberal dalam Pembangunan di Negara Pasca-Kolonial (Pengalaman Amerika Latin dan Asia). *Jurnal Sosial Politik Universitas Gadjah Mada*, 15, 269–280. ugm.ac.id